



## Dinsos Dua Kali Cermati KMS

UMBULHARJO -- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja mengaku mencermati serius mekanisme dan distribusi pemberian Kartu Menuju Sehat (KMS). Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kasus pemberian KMS kepada keluarga yang sejatinya tak berhak karena tergolong mampu dari segi ekonomi.

Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Tri Maryatun, kepada sejumlah media, Jumat (27/11) kemarin, menyatakan pihaknya sampai dua kali melakukan tahapan verifikasi dan uji publik. Verifikasi dan uji publik bagi calon penerima KMS melibatkan tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan RW setempat.

"Pada bulan Mei kami melakukan uji publik pertama dan di situ kami terang-terangan, 'Ini lho Pak RT, Pak RW, usulan yang panjenengan masukkan. Apakah layak untuk mendapatkan KMS?' katanya men-erangkan saat proses uji publik.

KMS sendiri merupakan identitas yang menunjukkan keluarga dan anggota keluarga yang tercantum di dalamnya merupakan penduduk sasaran jaminan perlindungan

sosial atau keluarga miskin. Namun sayangnya, Tri Maryatun mengakui masih banyak masyarakat salah kaprah memahami apa itu KMS. Ini bermula dari kecemburuan yang terjadi dalam masyarakat.

"Ada yang bilang, 'Aku kok nggak dapat KMS, padahal anakku tiga sekolah semua?' Mungkin banyak yang mengira KMS itu kartu untuk dapat keringanan atau bantuan sekolah, padahal bukan. KMS itu adalah kartu identitas yang menunjukkan suatu keluarga tergolong miskin atau sekarang namanya penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial," ungkapnya.

Tri Maryatun mengatakan, proses verifikasi dan uji publik yang dilakukan Dinsosnakertrans terbuka untuk masukan ataupun kritik. "Jika ada warga atau tokoh masyarakat yang menilai si A itu sudah tidak pantas, dan si B seharusnya berhak, bisa mengajukan usulan atau masukan ke kami," ucap Tri.

Sementara uji publik tahap kedua berlangsung di bulan November. Jika terdapat perbedaan data dari uji publik tahap pertama, Dinsosnakertrans segera melakukan verifikasi kilat.

"Bulan Juli sampai Agustus, dari hasil

pendataan di lapangan kita buat form lengkap by name dan by address. Kemudian kita lakukan uji publik tahap kedua untuk memverifikasi kembali apakah betul yang bersangkutan layak mendapatkan KMS," terangnya.

Untuk tahun 2016, Dinsosnakertrans telah memprogramkan pembagian KMS untuk 18.801 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 60.230 jiwa. Dari pendataan tahun ini bagi pemegang KMS 2016, sebanyak 31 KK atau 101 jiwa dikategorikan fakir miskin.

"Kategori miskin ada 5.983 KK atau 18.982 jiwa, sedangkan kategori rentan miskin ada 12.867 KK atau 41.147 KK," tambah dia.

Proses verifikasi dan uji publik kadang juga melibatkan langsung perangkat kelurahan. Lurah Rejowinangun, Retnaningtyas, adalah salah satu Lurah yang tak segan-segan turut membantu proses verifikasi.

"Saya panggil sendiri Ketua RT dan Ketua RW, kemudian kami datangi keluarga calon penerima KMS. Prosesnya hampir setahun, Mas, dan kami benar-benar melihat kondisi keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin," ungkapnya. (ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005